

BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah

Perekonomian daerah merupakan sub sistem dari perekonomian nasional dan dunia. Sebelum diuraikan kondisi ekonomi Kabupaten Kudus, akan diuraikan mengenai kondisi perekonomian dunia dan nasional.

1. Kondisi Perekonomian Dunia

Dana Moneter Internasional (IMF) menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2015 dan 2016. Dalam laporan *World Economic Outlook*, IMF memproyeksikan ekonomi global hanya akan tumbuh 3,5% di tahun 2015, sedangkan di tahun 2016 ekonomi dunia diprediksi tumbuh 3,7%. Anjloknya harga minyak dunia merupakan faktor yang mampu mendukung pertumbuhan. Namun, faktor positif tersebut juga diimbangi oleh sentimen negatif, seperti depresiasi mata uang euro dan yen.

Perekonomian Amerika Serikat (AS) paling bagus diantara ekonomi utama lainnya. Pertumbuhan ekonomi AS diproyeksikan sebesar 3,6% pada tahun 2015. Di kawasan Eropa, meski harga minyak dunia turun, tapi rendahnya nilai investasi membuat ekonomi kawasan ini terancam deflasi. Langkah Bank Sentral Eropa memperluas stimulus moneter dengan pembelian obligasi pemerintah mensinyalir Eropa tengah berjuang dari krisis. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di 19 negara Eropa tumbuh sebesar 1,2% pada tahun 2015 dan sebesar 1,4% pada tahun 2016.

Sementara, ekonomi Tiongkok pada tahun 2015 akan melambat karena pihak berwenang di Beijing akan lebih peduli dengan risiko kredit ketimbang pertumbuhan investasi. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok diproyeksikan sebesar 6,3%. Dampak pertumbuhan Tiongkok yang lebih lambat akan berpengaruh terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi negara-negara Asia lainnya termasuk Indonesia. Negara berkembang harus menghadapi risiko pelarian modal jika Bank Sentral AS memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang di sepanjang tahun 2015 bakal turun menjadi 4,3%.

2. Kondisi Perekonomian Nasional

Berdasarkan analisis Kamar Dagang Indonesia (KADIN), kondisi makro ekonomi Indonesia sampai akhir tahun 2014 secara relatif belum kritis walau pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang

rendah. Namun tidak dapat dikatakan bahwa perekonomian sudah sepenuhnya terkendali, karena masih diwarnai oleh permasalahan defisit anggaran belanja dan defisit neraca perdagangan dan neraca berjalan. Perekonomian belum didukung oleh sisi pasokan yang kuat, karena lebih bertumpu kepada sisi permintaan. Perekonomian Indonesia ditopang oleh arus modal portofolio yang “*vulnerable*” dan dikhawatirkan terjadinya arus modal balik yang menyebabkan ekonomi tidak terkendali, kecuali adanya kebijakan ekonomi yang tepat sasaran. Perekonomian Indonesia juga menghadapi masalah defisit neraca perdagangan dan defisit neraca berjalan, karena lemahnya struktur ekonomi serta lemahnya kemandirian ekonomi bangsa.

Setelah empat tahun Indonesia menikmati kebijakan “*quantitative easing*” (QE) serta suku bunga rendah di Amerika, Pemerintah Amerika telah mengakhiri kebijakan QE nya pada bulan Oktober 2014, karena dikhawatirkan berdampak serius terhadap disparitas pendapatan di Amerika Serikat. Perbaikan ekonomi di Amerika Serikat akhir-akhir ini akan berdampak negatif terhadap negara-negara dengan sistem ekonomi yang terbuka, karena Amerika setiap saat dapat menarik kembali dana yang diinvestasikan kenegara-negara tersebut sebagai stimulan terhadap ekonomi Amerika. Pemerintah Indonesia harus siap menghadapi kemungkinan “*arus balik*” atau “*capital flight*” yang akan berdampak negatif terhadap nilai tukar rupiah dan defisit neraca pembayaran dan neraca berjalan.

Prediksi kedepan perekonomian Indonesia belum sepenuhnya menggembirakan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Inflasi diperkirakan mencapai 5,0 persen. Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia melalui sinergi kebijakan serta koordinasi pengendalian inflasi di tingkat pusat dan daerah senantiasa berupaya mengendalikan laju inflasi pada tahun 2015 agar tetap pada rentang sasaran inflasi tahun 2015 sebesar $4,0 \pm 1,0$ persen. Rata-rata nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS diperkirakan berada pada kisaran Rp12.200 per USD. Relatif ketatnya likuiditas global sebagai dampak peningkatan suku bunga acuan oleh the Fed diperkirakan berpotensi memberikan tekanan terhadap perkembangan nilai tukar rupiah ke depan. Suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan akan turut mengalami tekanan dan sedikit lebih tinggi yaitu sebesar 6,2 persen.

Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan akan berada pada kisaran rata-rata USD70 per barel. Rendahnya harga minyak dunia diperkirakan masih akan berlanjut pada tahun 2015 mengingat pasokan minyak yang masih berlebih, terutama dengan adanya potensi pemanfaatan *shale oil* dan gas. Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia kedepan relatif stabil walaupun belum bebas dari risiko terjadinya ketidak-stabilan ekonomi. *Lifting* minyak diperkirakan akan terealisasi sebesar 849 ribu barel per hari.

Lifting gas bumi diperkirakan mencapai 1.177 ribu barel setara minyak per hari.

Tantangan eksternal yang dihadapi oleh perekonomian domestik nasional pada tahun 2015 adalah belum stabilnya perekonomian dunia, termasuk negara-negara mitra dagang utama Indonesia seperti Tiongkok yang diperkirakan akan kembali mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Kondisi tersebut yang disertai dengan penurunan harga komoditas global terutama harga minyak mentah dunia berpotensi memberikan tekanan pada perekonomian Indonesia. Dalam merespon kondisi eksternal tersebut, Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia telah menempuh berbagai kebijakan untuk menjaga stabilitas perekonomian domestik terutama stabilitas nilai tukar dan pengendalian inflasi. Pemerintah juga telah mengambil langkah-langkah strategis di bidang fiskal terutama dalam menjaga kesinambungan fiskal dan upaya mendukung perbaikan defisit neraca berjalan.

3. Kondisi Perekonomian Provinsi Jawa Tengah

Kondisi perekonomian Jawa Tengah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan selama kurun waktu 2011 – 2012 ditunjukkan dengan angka pertumbuhan ekonomi yang selalu meningkat dari sebesar 6,01% pada tahun 2011 menjadi 6,34% pada tahun 2012, namun mengalami perlambatan pada Tahun 2013 dan tahun 2014. Pertumbuhan ekonomi tahun 2014 sebesar 5,47 persen, sedikit menurun jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 5,81 persen. Angka inflasi di Jawa Tengah pada tahun 2014 sebesar 8,22% (yoy), meningkat jika dibandingkan dengan inflasi tahun 2013 (7,99%). Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai indikator pemicu inflasi baik yang bersifat eksternal maupun internal, antara lain disebabkan oleh kenaikan harga beberapa komoditas barang dan jasa, terutama bensin, tarif listrik, cabai merah, beras, bahan bakar rumah tangga, tukang bukan mandor, cabai rawit, kontrak rumah, angkutan dalam kota, serta akademi/perguruan tinggi.

Perkembangan ekonomi makro Jawa Tengah masih lebih banyak didorong oleh peningkatan konsumsi, terutama konsumsi pemerintah (realisasi belanja APBD) dan rumah tangga. Apabila dilihat dari sisi pengeluaran/penggunaan PDRB Jawa Tengah tahun 2014, diketahui bahwa komponen penggunaan konsumsi rumah tangga masih menjadi penyumbang tertinggi yaitu sebesar 63,69%, diikuti dengan ekspor barang dan jasa sebesar 48,82% dan Impor barang dan jasa sebesar 46,82%. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2013, diketahui bahwa distribusi PDRB tahun 2014 pada komponen pengeluaran rumah tangga mengalami penurunan dari 63,96% menjadi 63,69%, sedangkan untuk komponen ekspor barang dan jasa mengalami peningkatan dari 47,69% menjadi

48,82%. Untuk kontribusi PMTB pada tahun 2014 sebesar 20,77% dan konsumsi pemerintah sebesar 10,99%

Dilihat dari lapangan usaha, kinerja sektor utama masih didominasi oleh sektor industri pengolahan; sektor perdagangan, hotel dan restoran; serta sektor pertanian. Perlambatan ekonomi daerah dipengaruhi oleh melambatnya investasi daerah baik pada investasi bangunan maupun non bangunan. Adanya hambatan dalam melakukan investasi di Jateng disebabkan antara lain oleh keterbatasan infrastruktur, pelayanan investasi dan ketersediaan SDM. Infrastruktur daerah dirasakan belum memadai terutama mengenai sarana prasarana energi, air, jalan, jembatan, pelabuhan maupun bandara.

4. Kondisi Perekonomian Kabupaten Kudus

Perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Kudus dapat dilihat dari beberapa indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi, Laju inflasi, dan realisasi investasi. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2012 mencapai Rp.13.754.585,17 juta, tahun 2013 sebesar Rp. 14.398.651,02 juta, dan pada tahun 2014 diproyeksikan meningkat menjadi Rp.15.137.301,80 juta. Adapun PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2012 mencapai Rp. 36.959.414,03 juta, tahun 2013 sebesar Rp. 41.192.663,77 juta, dan pada tahun 2014 diproyeksikan meningkat menjadi Rp. 44.906.550,52 juta. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus tahun 2014 diproyeksikan sebesar 5,13%, lebih tinggi dari tahun 2013 sebesar 4,68%. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 masih diproyeksikan sebesar 5,37%, sedangkan tahun 2016 ditargetkan sebesar 5,64%. Perkuatan infrastruktur ekonomi terus diupayakan agar pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan pemerataan kekuatan ekonomi pada semua wilayah dan sektor usaha.

Perkembangan ekonomi Kabupaten Kudus didorong oleh peningkatan sektor Industri Pengolahan dan sektor Perdagangan Hotel dan Restoran, masing-masing memiliki kontribusi terhadap PDRB sebesar 61,47% dan 26,92% pada tahun 2013. Sektor-sektor lain yang berkembang adalah sektor bangunan, sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan, dan sektor komunikasi. Kontribusi sektor pertanian pada tahun 2013 sebesar 2,69%. Hal ini patut menjadi perhatian mengingat sektor ini mempunyai kedudukan strategis, karena untuk mendukung ketahanan pangan, dan menjadi penyerap tenaga kerja di pedesaan. Penguatan sektor moneter melalui pengendalian suku bunga SBI, diikuti penurunan bunga pinjaman dan *yield* obligasi, namun terjadi tekanan pada rupiah terhadap dollar dan volatilitas yang tinggi dalam bursa saham, mengakibatkan keuntungan sektor keuangan dan perbankan tetap bahkan cenderung berkurang.

Laju inflasi Kabupaten Kudus tahun 2014 (*year on year*) sebesar 8,59%, sedikit lebih tinggi dari tahun 2013 sebesar 8,31%. Meningkatnya angka inflasi disebabkan oleh peningkatan harga pada komoditas *volatile foods* antara lain beras, daging, bawang merah, bawang putih, telur, dan cabe. Kelompok komoditas yang memberikan andil/sumbangan inflasi yaitu kelompok Bahan Makanan, kelompok Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan, dan Kelompok Kesehatan. Pada tahun 2015 laju inflasi diproyeksikan berada pada kisaran 5±1%.

Perkembangan kondisi perekonomian daerah Kabupaten Kudus secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1
Perkembangan dan Proyeksi Indikator Makro Ekonomi
Kabupaten Kudus Tahun 2012-2016

| No. | Indikator Makro | Realisasi | | Proyeksi | | |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Tahun 2012 | Tahun 2013 | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Tahun 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | PDRB | | | | | |
| | ADH Konstan (juta Rp) | 13.754.585,17 | 14.398.651,02 | 15.137.301,80 | 15.950.174,91 | 16.850.041,42 |
| | ADH Berlaku (juta Rp) | 36.959.414,03 | 41.192.663,77 | 44.906.550,52 | 49.082.859,72 | 53.500.317,09 |
| 2. | Tingkat Pertumbuhan Ekonomi / PDRB Harga Konstan tahun tertentu | 4,33 % | 4,68 % | 5,13 % | 5,37% | 5,64% |
| 3. | Tingkat Inflasi | 4,77% | 8,31 % | 8,59% | 5±1% | 5±1% |
| 4. | Jumlah Penduduk Miskin | 68.100 | 70.100 | 67.091 | 66.731 | 66.537 |
| 5. | Tingkat Pengangguran Terbuka | 5,85 | 5,75 | 5,03 | 5,03 | 5,03 |
| 6. | PDRB Perkapita (juta Rupiah) | 47,826 | 52,912 | 54,311 | 59,578 | 64,325 |
| 7. | Investasi Riil (Juta Rupiah) | 12.163.499 | 11.579.827 | 8.825.278 | 8.440.186 | 9.688.956 |
| 8. | ICOR | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 9. | IPM (Indeks Pembangunan Manusia) | 73,69 | 74,2 | 74,2 | 74,5 | 74,7 |

Sumber : BPS Kabupaten Kudus Tahun 2014

Investasi swasta dipengaruhi kondisi ekonomi, infrastruktur lokasi, peraturan yang mendukung investasi. Semakin baik kondisi sarana prasarana daerah penunjang investasi dan kebijakan pemerintah yang pro investasi maka akan menjadi daya tarik investasi. Kabupaten Kudus merupakan lokasi yang menarik untuk berinvestasi terutama pada sektor industri, perdagangan dan restoran, perumahan, jasa keuangan, transportasi, dan komunikasi. Nilai realisasi investasi Kabupaten Kudus tahun 2013 sebesar Rp.11.579.827.503.311. Realisasi investasi ini tidak lepas dari upaya pemerintah dalam penyediaan infrastruktur dan iklim investasi yang kondusif. Peningkatan pelayanan perijinan dan penyebaran peluang investasi semakin mendorong calon wirausaha dan investor untuk mengembangkan usahanya di Kabupaten Kudus.

Kebutuhan investasi *Incremental Capital Output Ratio (ICOR)* merupakan suatu angka yang menunjukkan besarnya investasi yang dibutuhkan apabila ingin mencapai pertumbuhan tertentu. Berdasarkan hasil penelitian diketahui, bahwa ICOR Kabupaten Kudus 3,5% artinya untuk menaikkan PDRB Rp. 1,- dibutuhkan investasi sebesar Rp. 3,5,-. Dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,64% dibutuhkan investasi sebesar Rp. 9.688.956.508.000,-. Mengingat kemampuan pemerintah sebesar Rp. 1.756.287.525.000,- maka dibutuhkan investasi swasta sebesar Rp. 7.932.668.983.000,-. Semakin baik kondisi sarana prasarana pendukung investasi, maka angka ICOR menurun, artinya semakin kecil investasi yang dibutuhkan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Ekonomi Tahun 2016

Kondisi perekonomian di Kabupaten Kudus sangat dipengaruhi potensi dan kebijakan pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Tengah. Salah satu kebijakan pemerintah yang menjadi tantangan daerah adalah *ASEAN Economic Community (AEC)* mulai tahun 2015. Pasar bebas ASEAN dapat menyebabkan terjadinya neraca defisit perdagangan (ekspor < impor). Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), disepakati adanya 12 sektor usaha yang diliberalisasi yaitu 7 perdagangan ekspor impor yang berbasis pertanian, elektronik, perikanan, karet, tekstil, otomotif, kayu, dan lima 5 produk jasa bidang transportasi udara, pelayanan kesehatan, turisme, e-ASEAN, dan jasa logistik.

Implementasi AEC juga menjadi peluang bila kita dapat memanfaatkannya dengan baik untuk meningkatkan ekspor, antara lain dengan meningkatkan kualitas dan produktivitas barang dan jasa secara bertahap mengacu standar yang ditentukan, khususnya produk-produk unggulan daerah hingga mampu bersaing di luar negeri. Beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk menghadapi AEC antara lain sebagai berikut:

1. Penyesuaian, persiapan dan perbaikan regulasi baik secara kolektif maupun individual (reformasi regulasi);
2. Peningkatan kualitas SDM baik dalam birokrasi maupun dunia usaha;
3. Penguatan posisi usaha skala menengah, kecil dan mikro;
4. Penguatan kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta;
5. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mengurangi ekonomi biaya tinggi;
6. Pengembangan sektor-sektor prioritas yang berdampak luas dan komoditas unggulan;
7. Penyediaan permodalan yang mudah diakses pelaku usaha dari berbagai skala usaha;

8. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur fisik, seperti prasarana dan sarana transportasi, telekomunikasi, revitalisasi pasar, dan lain-lain.

Beberapa tantangan perekonomian daerah lainnya dapat dirinci sebagai berikut :

1. Pengaruh eksternal perekonomian dunia yang cenderung melambat yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Nasional Regional dan Kabupaten Kudus.
2. Fluktuasi harga BBM dunia mengakibatkan ketidakpastian ekonomi Indonesia.
3. Kondisi infrastruktur yang kurang memadai untuk mendukung peningkatan investasi yang lebih besar menuntut pemerintah untuk menyediakannya.
4. Tingginya permintaan produk yang berkualitas menuntut peningkatan standarisasi kualitas produk.
5. Adanya tuntutan buruh tentang jaminan pensiun, kesehatan dan komponen acuan survei kehidupan hidup layak.
6. Penerapan dan penguasaan teknologi yang masih sangat terbatas menyebabkan ongkos produksi untuk menghasilkan suatu produk menjadi mahal dan kualitas barang/produk yang rendah.
7. Adanya pergeseran pola hidup (*life style*) masyarakat yang cenderung mengkonsumsi barang impor.
8. Masih tingginya risiko bencana alam, terutama banjir.

Beberapa peluang dalam peningkatan kemajuan perekonomian Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut:

1. Letak geografis yang strategis menjadi peluang Kabupaten Kudus sebagai jalur distribusi/perdagangan aneka barang dan jasa.
2. Meningkatnya pelayanan perizinan, kondusifitas daerah, dan upah tenaga kerja di Kabupaten Kudus yang masih kompetitif mendorong peningkatan investasi berskala nasional.
3. Banyaknya potensi unggulan daerah Kabupaten Kudus yang dapat dikembangkan, antara lain furniture, gebyog, bordir, konveksi dan makanan khas Kudus.
4. Meningkatnya dukungan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam pembangunan daerah.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dalam RKPD dimaksudkan untuk mengarahkan perencanaan pembangunan menuju penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien. Arah dan kebijakan keuangan daerah tersebut akan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam proses penyusunan APBD.

Penentuan arah kebijakan keuangan daerah perlu memperhatikan target RPJMD dan situasi dan kondisi saat ini, mengingat banyak hal yang mempengaruhi prediksi/asumsi yang telah ditetapkan dalam RPJMD pada tahun 2016. Kondisi yang mempengaruhi antara lain kondisi perekonomian daerah dan regulasi, yang berdampak pada kebijakan pendapatan, belanja maupun pembiayaan.

Perkembangan pendapatan daerah menjadi satu dasar dalam perhitungan kapasitas fiskal daerah. Rata-rata pertumbuhan pendapatan Kabupaten Kudus tahun 2013 – 2015 mencapai sebesar 11,25%, yang terdiri dari Dana perimbangan rata-rata meningkat sebesar 4,45%, PAD rata-rata meningkat 33,00% dan Lain-lain pendapatan yang sah rata-rata meningkat 22,09%, seperti terlihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Kudus

| No. | Uraian | (n-3)** | (n-2)** | (n-1)** | Rata-rata Pertumb |
|--------|---|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| | | Realisasi 2013 (Rp) | Realisasi 2014 (Rp) | Anggaran 2015 (Rp) | (%) |
| 1 | PENDAPATAN | 1.386.183.084.659 | 1.610.237.157.941 | 1.754.169.149.000 | 11,25 |
| 1.1. | Pendapatan Asli Daerah | 144.995.092.035 | 234.073.380.352 | 244.741.959.000 | 33,00 |
| 1.1.1. | Pajak Daerah | 58.194.212.419 | 63.085.731.660 | 64.925.668.000 | 5,66 |
| 1.1.2. | Retribusi Daerah | 15.588.523.244 | 21.083.379.548 | 24.490.215.000 | 25,70 |
| 1.1.3. | Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan | 4.318.220.147 | 5.077.402.066 | 8.611.400.000 | 43,59 |
| 1.1.4. | Lain-Lain PAD yang sah | 66.894.136.225 | 144.826.867.078 | 146.714.676.000 | 58,90 |
| 1.2. | Dana Perimbangan | 954.512.784.776 | 1.012.351.534.176 | 1.041.015.351.000 | 4,45 |
| 1.2.1. | Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak | 182.896.969.776 | 175.108.008.176 | 179.549.844.000 | (0,86) |
| 1.2.2. | Dana Alokasi Umum | 719.406.935.000 | 795.851.851.000 | 784.919.177.000 | 4,63 |
| 1.2.3. | Dana Alokasi Khusus | 52.208.880.000 | 41.391.675.000 | 76.546.330.000 | 32,11 |
| 1.3. | Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah | 286.675.207.848 | 363.812.243.413 | 426.658.612.000 | 22,09 |
| 1.3.1 | Hibah | 1.076.193.701 | 5.755.762.636 | 10.427.090.000 | - |
| 1.3.2 | Dana Darurat | - | - | - | - |
| 1.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 74.958.695.147 | 95.320.988.497 | 90.081.583.000 | 10,83 |
| 1.3.4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 146.439.054.000 | 169.337.757.000 | 264.680.001.000 | 35,97 |
| 1.3.5 | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | 64.201.265.000 | 93.397.735.280 | 61.469.938.000 | 5,65 |

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015

Apabila dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Kudus pada tahun 2016, pendapatan daerah Kabupaten Kudus tahun 2016 diproyeksikan lebih rendah. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak, dan Dana Alokasi Umum dari pemerintah pusat, serta Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau

Pemerintah Daerah Lainnya. DAU dan DAK yang diperoleh Kabupaten Kudus tahun 2016 diproyeksikan sama dengan APBD tahun 2015, yaitu DAU sebesar Rp. 784.919.177.000,-, dan DAK sebesar Rp.76.546.330.000,-. Sementara itu Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya pada tahun 2016 diproyeksikan meningkat 19,39% menjadi Rp. 214.366.616.000,-. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus diproyeksikan sama dengan APBD tahun 2015 sebesar Rp. 264.680.001.000,-. Begitu pula dengan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp.61.469.938.000,-. Sementara itu Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya meningkat sebesar 6,91% menjadi Rp 96.307.857.575,-. Perbandingan proyeksi RPJMD dengan proyeksi RKPD Tahun 2016 Kabupaten Kudus tercantum pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Evaluasi/Catatan Atas Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah
RKPD Tahun 2015 Kabupaten Kudus

| No | Uraian | Proyeksi RPJMD Tahun Rencana (2016) (Rp) | Proyeksi RKPD 2016 |
|------|--|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | PENDAPATAN | 1.864.868.992.000 | 1.754.169.149.000 |
| 1.1. | Pendapatan Asli Daerah | 231.208.045.000 | 255.197.777.000 |
| | Pajak Daerah | 91.567.848.000 | 70.118.283.000 |
| | Retribusi Daerah | 42.659.860.000 | 24.556.075.000 |
| | Hasil pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 7.619.009.000 | 5.706.050.000 |
| | Lain-Lain PAD yang sah | 89.361.328.000 | 154.817.369.000 |
| 1.2. | Dana Perimbangan | 1.176.267.217.000 | 1.075.832.123.000 |
| | Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak | 196.947.077.000 | 214.366.616.000 |
| | Dana Alokasi Umum | 924.131.240.000 | 784.919.177.000 |
| | Dana Alokasi Khusus | 55.188.900.000 | 76.546.330.000 |
| 1.3. | Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah | 457.393.730.000 | 423.139.249.000 |
| | Hibah | 8.498.914.000 | 681.453.000 |
| | Dana Darurat | - | - |
| | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 112.825.404.000 | 96.307.857.575 |
| | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 259.511.675.000 | 264.680.001.000 |
| | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | 76.557.737.000 | 61.469.938.000 |
| | Total Pendapatan (a) | 1.864.868.992.000 | 1.754.169.149.000 |
| 2 | Pencairan Dana Cadangan (b) | - | - |
| 3 | Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran | | |
| | Saldo kas neraca daerah | - | - |
| | Dikurangi: | | |
| | Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun yang belum terselesaikan | - | - |
| | Kegiatan lanjutan | - | - |
| | Jumlah (c) | - | - |
| | Jumlah proyeksi penerimaan riil (a+b+c) | 1.864.868.992.000 | 1.754.169.149.000 |

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015

Kebutuhan Fiskal dapat dilihat dari alokasi belanja yang terbagi dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung. Perkembangan belanja tidak langsung selama tahun 2013-2015 terangkum dalam Tabel 3.4 berikut ini.

Tabel 3.4
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Tidak Langsung
Kabupaten Kudus

| No | Uraian | Realisasi Tahun 2013 | Realisasi Tahun 2014 | Anggaran pada Tahun 2015 | Rata-rata Pertumb |
|----|---|----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|
| | | Rp | Rp | Rp | |
| A | Belanja Tidak Langsung | 738.734.501.503 | 848.624.442.304 | 1.033.618.951.000 | 19,96 |
| 1 | Belanja Pegawai | 647.389.397.621 | 716.652.790.837 | 832.057.954.000 | 14,26 |
| 2 | Belanja Bunga | 44.378.263 | 30.359.278 | 70.802.000 | 29,77 |
| 3 | Belanja Hibah | 25.607.571.733 | 48.794.986.000 | 29.169.675.000 | 6,96 |
| 4 | Belanja Bansos | 24.098.658.500 | 32.133.595.000 | 26.229.757.000 | 4,57 |
| 5 | Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten /Kota dan Pemerintah Desa | 4.319.038.625 | 6.280.724.375 | 8.697.695.000 | 50,69 |
| 6 | Belanja Bantuan Kepada Provinsi/Kabupaten /Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik | 37.271.465.261 | 43.212.266.814 | 134.323.068.000 | 130,20 |
| 7 | Belanja Tidak Terduga | 3.991.500 | 1.519.720.000 | 3.000.000.000 | 37.529,86 |

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas, belanja tidak langsung tahun 2013 – 2015 rata-rata meningkat 19,96%, dimana dominasi belanja pegawai rata-rata meningkat 14,26%. Belanja bunga dianggarkan sesuai kebutuhan sehingga fluktuatif. Begitu pula dengan Belanja hibah dengan realisasi sesuai dengan proposal. Kebijakan keuangan untuk hibah dan bansos telah diatur melalui Permendagri 32 tahun 2011, yang memberi pedoman lebih rinci sejak KUA, sehingga lebih transparan. Hal ini akan menjadi pertimbangan dalam menghitung belanja wajib mengikat yang terakumulasi dalam belanja tidak langsung.

Neraca atau laporan posisi keuangan adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Informasi yang dapat disajikan di neraca antara lain posisi sumber kekayaan entitas dan sumber pembiayaan untuk memperoleh kekayaan entitas tersebut dalam suatu periode akuntansi.

Posisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus tahun 2013–2014 sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.5. Dari tabel neraca dapat diperoleh rasio likuiditas, dan *solvabilitas*. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas diukur

dengan Rasio Lancar, capaian tahun 2013 sebesar 70,07, dan tahun 2014 sebesar 50,04. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan kas Pemerintah daerah cukup kuat untuk membackup kewajiban jangka pendek.

Rasio solvabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Rasio total hutang terhadap total asset pada tahun 2013 sebesar 0,0024, dan tahun 2014 sebesar 0,0021. Rasio hutang terhadap modal sebesar tahun 2013 sebesar 0,0024, dan tahun 2014 sebesar 0,002. Kondisi ini menunjukkan bahwa hutang yang dimiliki pemerintah daerah masih kategori aman, artinya pemerintah daerah masih mampu membayar kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang dengan menggunakan asset yang dimilikinya.

Pada tahun 2014 total asset meningkat 24,44%, untuk aset tetap mengalami peningkatan sebesar 37,43%. Adapun aset lainnya mengalami penurunan sebesar 1,15%. Pada tahun 2014 terjadi peningkatan hutang yang cukup signifikan sebesar 8,10%, meskipun demikian masih dalam posisi aman. Kewajiban jangka panjang meningkat 216,8%, dan kewajiban jangka pendek meningkat 6,12%. Selisih antara aset dengan kewajiban diperoleh jumlah ekuitas, yang meningkat sebesar 24,48%. Ekuitas yang terbesar berbentuk aset dana investasi yang berbentuk tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, jaringan dan irigasi.

Tabel 3.5
Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus
Per 31 Desember 2014 dan 2013

| No | Uraian | 2014 | 2013 |
|----|---|--------------------|--------------------|
| | | (Rp) | (Rp) |
| 1 | ASET | | |
| a | ASET LANCAR | | |
| | Kas di Kas Daerah | 404.473.859.584,00 | 321.447.058.324,00 |
| | Kas DI Bendahara Penerimaan | 13.113.601,60 | 1.266.902.237,32 |
| | Kas DI Bendahara Pengeluaran | 27.383.400,00 | 4.358.000,00 |
| | Kas DI Badan Layanan Umum Daerah | 16.027.246.263,00 | 2.410.718.560,00 |
| | Investasi Jangka Pendek | 0,00 | 0,00 |
| | Piutang Pajak | 4.115.934.194,45 | 4.070.493.183,00 |
| | Piutang Retribusi | 164.847.827,75 | 1.560.900,00 |
| | Piutang Dana Bagi Hasil | 0,00 | 0,00 |
| | Piutang Dana Alokasi Umum | 0,00 | 0,00 |
| | Piutang Dana Alokasi Khusus | 0,00 | 0,00 |
| | Piutang Lain-Lain | 10.122.858.363,75 | 9.244.099.798,00 |
| | Persediaan | 29.203.051.750,90 | 13.433.587.176,04 |
| | Biaya Dibayar Dimuka | 427.351.188,99 | 501.146.337,00 |
| | JUMLAH ASET LANCAR | 464.575.646.174,44 | 352.379.924.515,36 |
| b | INVESTASI JANGKA PANJANG | | |
| | Investasi Non Permanen | | |
| | Pinjaman Kepada Perusahaan Negara | 0,00 | 0,00 |
| | Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah | 0,00 | 0,00 |
| | Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya | 0,00 | 0,00 |

| No | Uraian | 2014 | 2013 |
|----|--|------------------------|----------------------|
| | | (Rp) | (Rp) |
| | Investasi Dalam Surat Utang Negara | 0,00 | 0,00 |
| | Dana Bergulir | 958.945.225,50 | 1.597.275.773,50 |
| | Investasi Non Permanen Lainnya | 0,00 | 0,00 |
| | JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN | 958.945.225,50 | 1.597.275.773,50 |
| | Investasi Permanen | | |
| | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 63.594.247.234,04 | 57.865.293.036,31 |
| | Penyertaan Modal Dalam Proyek Pembangunan | 0,00 | 0,00 |
| | Penyertaan Modal Perusahaan Patungan | 0,00 | 0,00 |
| | Investasi Permanen Lainnya | 0,00 | 0,00 |
| | JUMLAH INVESTASI PERMANEN | 63.594.247.234,04 | 57.865.293.036,31 |
| | JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG | 64.553.192.459,54 | 59.462.568.809,81 |
| | | | |
| c | ASET TETAP | | |
| | Tanah | 885.516.756.530,00 | 860.876.339.330,00 |
| | Peralatan dan Mesin | 436.242.635.537,00 | 380.233.365.426,00 |
| | Gedung dan Bangunan | 910.344.170.519,61 | 854.070.543.915,78 |
| | Jalan, Jaringan dan Investasi | 1.005.630.490.356,76 | 759.338.106.361,76 |
| | Aset Tetap Lainnya | 52.798.592.105,00 | 46.921.809.081,00 |
| | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 9.923.396.070,00 | 1.660.575.242,00 |
| | Akumulasi Penyusutan | (1.188.012.801.998,00) | 0,00 |
| | JUMLAH ASET TETAP | 2.112.443.239.120,37 | 2.903.100.739.356,54 |
| | | | |
| d | DANA CADANGAN | | |
| | Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 |
| | JUMLAH DANA CADANGAN | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| e | ASET LAINNYA | | |
| | Tagihan Piutang Penjualan Angsuran | 0,00 | 0,00 |
| | Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah | 7.700.000,00 | 7.700.000,00 |
| | Kemitraan Dengan Pihak Ketiga | 18.708.009.235,00 | 17.425.643.800,00 |
| | Aset Tidak Berwujud | 5.175.358.856,00 | 4.795.525.276,00 |
| | Aset Lain-Lain | 84.420.140.740,00 | 84.839.040.969,78 |
| | JUMLAH ASET LAINNYA | 108.311.208.831,00 | 107.067.910.045,78 |
| | | | |
| | JUMLAH ASET | 2.749.883.286.585,35 | 3.422.011.142.727,49 |
| | | | |
| 2 | KEWAJIBAN | | |
| a | KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | |
| | Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | 19.830.026,00 | 0,00 |
| | Utang Bunga | 0,00 | 0,00 |
| | Utang Pajak | 0,00 | 0,00 |
| | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Utang Bank | 0,00 | 0,00 |
| | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Utang Obligasi | 0,00 | 0,00 |
| | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Pemerintah Pusat | 130.036.311,32 | 143.517.012,31 |
| | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Pemerintah Provinsi | 0,00 | 0,00 |
| | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Pemerintah Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 |
| | Pendapatan Diterima Dimuka | 0,00 | 0,00 |
| | Utang Jangka Pendek Lainnya | 6.480.214.036,00 | 6.898.467.017,00 |
| | JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | 6.630.080.373,32 | 7.041.984.029,31 |
| | | | |
| | | | |

| No | Uraian | 2014 | 2013 |
|----|---|----------------------|----------------------|
| | | (Rp) | (Rp) |
| b | KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | | |
| | Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan | 0,00 | 0,00 |
| | Utang Dalam Negeri-Obligasi | 0,00 | 0,00 |
| | Utang Pemerintah Pusat | 59.976.742,82 | 190.013.054,14 |
| | Utang Pemerintah Provinsi | 0,00 | 0,00 |
| | Utang Pemerintah Kabupaten/kota | 0,00 | 0,00 |
| | Utang Luar Negeri - Sektor Perbankan | 0,00 | 0,00 |
| | JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | 59.976.742,82 | 190.013.054,14 |
| | JUMLAH KEWAJIBAN | 6.690.057.116,14 | 7.231.997.083,45 |
| 3 | EKUITAS DANA | | |
| a | EKUITAS DANA LANCAR | | |
| | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) | 420.502.501.121,00 | 323.862.134.884,00 |
| | Cadangan Untuk Piutang | 14.403.640.385,95 | 13.316.153.881,00 |
| | Cadangan Untuk Persediaan | 29.203.051.750,90 | 13.433.587.176,04 |
| | Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek | (6.610.250.347,32) | (7.041.984.029,31) |
| | Pendapatan yang Ditangguhkan | 19.271.701,60 | 1.266.902.237,32 |
| | Cadangan Untuk Biaya Dibayar Dimuka | 427.351.188,99 | 501.146.337,00 |
| | Penerimaan Dana Talangan Pengadaan Pangan Dari Propinsi Jawa Tengah | 0,00 | 0,00 |
| | Penerimaan Kembali Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan Dari Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan | 0,00 | 0,00 |
| | JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR | 457.945.565.801,12 | 345.337.940.486,05 |
| b | EKUITAS DANA INVESTASI | | |
| | Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang | 64.553.192.459,54 | 59.462.568.809,81 |
| | Diinvestasikan Dalam Aset Tetap | 2.112.443.239.120,37 | 2.903.100.739.356,54 |
| | Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya (Tidak Termasuk Dana Cadangan) | 108.311.208.831,00 | 107.067.910.045,78 |
| | Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang | (59.976.742,82) | (190.013.054,14) |
| | Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan Kepada Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan | 0,00 | 0,00 |
| | Pembayaran Atas Penerimaan Dana Talangan Pengadaan Pangan Kepada Propinsi Jawa Tengah | 0,00 | 0,00 |
| | JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI | 2.285.247.663.668,09 | 3.069.441.205.157,99 |
| c | EKUITAS DANA CADANGAN | | |
| | Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 |
| | JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN | 0,00 | 0,00 |
| | JUMLAH EKUITAS DANA | 2.743.193.229.469,21 | 3.414.779.145.644,04 |
| | JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA | 2.749.883.286.585,35 | 3.422.011.142.727,49 |

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari perkembangan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan daerah yang sah. Dengan melihat realisasi pendapatan tahun sebelumnya, dan perkembangan kondisi perekonomian daerah, pendapatan daerah Kabupaten Kudus pada tahun 2016 diproyeksikan sebesar Rp. 1.754.169.149.000,-, atau tumbuh sebesar 2,44% dari tahun sebelumnya, dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Secara umum, PAD dipengaruhi oleh tarif, obyek pajak dan retribusi, biaya operasional, dan kondisi perekonomian daerah. Pajak daerah yang paling dominan di Kabupaten Kudus adalah Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sementara itu retribusi yang paling dominan adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan (Puskesmas), Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dan Retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2016 diprediksikan sebesar Rp. 255.197.777.000,- meningkat 4,27% dari tahun 2015. Potensi pendapatan tahun 2016 yaitu adanya peningkatan penyeteroran baik yang berasal wajib pajak lama dan penambahan dari beberapa wajib pajak baru baik pajak daerah maupun retribusi daerah.

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak/bukan pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dana perimbangan diprediksikan meningkat sebesar 3,34% dari tahun 2015 menjadi sebesar Rp. 1.075.832.123.000,- pada tahun 2016. Unsur yang mengalami peningkatan yaitu Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak, sedangkan DAU dan DAK diprediksikan sama dengan tahun 2015.

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Lain-lain Pendapatan yang sah tahun 2016 diprediksikan sebesar Rp. 423.139.249.000,- atau mengalami penurunan sebesar 0,82% dibandingkan dengan tahun 2015. Penurunan angka ini bersumber dari Pendapatan Hibah Dari Pemerintah. Sementara itu Dana penyesuaian dan otonomi khusus yang diperuntukan bagi sertifikasi guru, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya diproyeksikan tetap. Adapun Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya diproyeksikan mengalami peningkatan.

Secara rinci perkembangan realisasi dan proyeksi pendapatan daerah disajikan pada Tabel 3.6 berikut ini.

Tabel 3.6
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013-2016

| No. | Uraian | Realisasi 2013 (Rp) | Realisasi 2014 (Rp) | Anggaran 2015 (Rp) | RKPD 2016 | Pertumb Tahun 2016 (%) |
|--------|---|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| 1 | PENDAPATAN | 1.386.183.084.659 | 1.610.237.157.941 | 1.712.415.149.000 | 1.754.169.149.000 | 2,44 |
| 1.1. | Pendapatan Asli Daerah | 144.995.092.035 | 234.073.380.352 | 244.741.959.000 | 255.197.777.000 | 4,27 |
| 1.1.1. | Pajak Daerah | 58.194.212.419 | 63.085.731.660 | 64.925.668.000 | 70.118.283.000 | 8,00 |
| 1.1.2. | Retribusi Daerah | 15.588.523.244 | 21.083.379.548 | 24.490.215.000 | 24.556.075.000 | 0,27 |
| 1.1.3. | Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan | 4.318.220.147 | 5.077.402.066 | 8.611.400.000 | 5.706.050.000 | (33,74) |
| 1.1.4. | Lain-Lain PAD yang sah | 66.894.136.225 | 144.826.867.078 | 146.714.676.000 | 154.817.369.000 | 5,52 |
| 1.2. | Dana Perimbangan | 954.512.784.776 | 1.012.351.534.176 | 1.041.015.351.000 | 1.075.832.123.000 | 3,34 |
| 1.2.1. | Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak | 182.896.969.776 | 175.108.008.176 | 179.549.844.000 | 214.366.616.000 | 19,39 |
| 1.2.2. | Dana Alokasi Umum | 719.406.935.000 | 795.851.851.000 | 784.919.177.000 | 784.919.177.000 | - |
| 1.2.3. | Dana Alokasi Khusus | 52.208.880.000 | 41.391.675.000 | 76.546.330.000 | 76.546.330.000 | - |
| 1.3. | Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah | 286.675.207.848 | 363.812.243.413 | 426.658.612.000 | 423.139.249.000 | (0,82) |
| 1.3.1 | Hibah | 1.076.193.701 | 5.755.762.636 | 10.427.090.000 | 681.453.000 | (93,46) |
| 1.3.2 | Dana Darurat | - | - | - | - | - |
| 1.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 74.958.695.147 | 95.320.988.497 | 90.081.583.000 | 96.307.857.000 | 6,91 |
| 1.3.4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 146.439.054.000 | 169.337.757.000 | 264.680.001.000 | 264.680.001.000 | - |
| 1.3.5 | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | 64.201.265.000 | 93.397.735.280 | 61.469.938.000 | 61.469.938.000 | - |

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah meliputi kebijakan peningkatan pendapatan daerah dan kebijakan belanja daerah. Meningkatnya tuntutan kebutuhan dana sebagai konsekwensi penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, melalui otonomi daerah, menuntut berbagai upaya penyesuaian manajemen keuangan daerah termasuk arah pengelolaan pendapatan dan belanja daerah. Pengelolaan pendapatan daerah telah dilakukan dengan berpedoman pada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Ketentuan perundang-undangan yang berlaku juga telah dijadikan acuan untuk menggali potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan realisasi dan proyeksi pendapatan serta pertimbangan kebutuhan pendanaan dimasa mendatang, perlu ditekankan arah kebijakan keuangan daerah. Arah kebijakan pendapatan daerah yang akan dilakukan tahun 2016 yaitu :

1. Dalam merencanakan target pendapatan asli daerah (PAD) mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi masing-masing jenis penerimaan daerah;
2. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
3. Membandingkan secara rasional hasil pengelolaan kekayaan daerah dengan nilai kekayaan daerah yang disertakan.

Disamping itu dilakukan upaya peningkatan dana perimbangan DAU, bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, pemanfaatan sarana prasarana serta SDM guna meningkatkan pendapatan daerah, serta meningkatkan kerjasama Pemerintah dan swasta.

Upaya pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan dilakukan melalui :

1. Peningkatan penerimaan pendapatan daerah melalui intensifikasi sumber-sumber pendapatan;
2. Melakukan kajian terhadap potensi sumber-sumber pendapatan daerah;
3. Melakukan komunikasi dan koordinasi yang terkait dengan dana perimbangan;
4. Peningkatan pengelolaan dan pengawasan terhadap perusahaan daerah;
5. Peningkatan pengelolaan pelayanan pajak daerah;
6. Efisiensi dan efektifitas pelayanan perijinan;

7. Koordinasi dengan SKPD pengelola pendapatan;
8. Evaluasi, revisi dan reformulasi regulasi kebijakan daerah yang berpotensi menghambat efisiensi dan efektifitas sumber-sumber pendapatan daerah;
9. Meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayaran retribusi daerah;
10. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
11. Mendayagunakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga;
12. Pendataan Wajib Pajak baru, baik pajak daerah maupun retribusi daerah.

Kinerja pendapatan daerah merupakan tolok ukur keberhasilan pengelolaan pendapatan. Diasumsikan bahwa sumber pendapatan yang dominan akan mempengaruhi kinerja pendapatan. Untuk mengetahui kinerja sumber-sumber pendapatan perlu dilihat proporsinya sebagaimana tercantum pada tabel 3.7 berikut ini.

Tabel 3.7
Persentase Sumber Pendapatan Kabupaten Kudus

| No. | Uraian | Realisasi 2013 (%) | Realisasi 2014 (%) | Anggaran 2015 (%) | RKPD 2016 | Tahun 2016 (%) |
|--------|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1 | PENDAPATAN | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1.754.169.149.000 | 100,00 |
| 1.1. | Pendapatan Asli Daerah | 10,46 | 14,54 | 14,29 | 255.197.777.000 | 14,55 |
| 1.1.1. | Pajak Daerah | 4,20 | 3,92 | 3,79 | 70.118.283.000 | 4,00 |
| 1.1.2. | Retribusi Daerah | 1,12 | 1,31 | 1,43 | 24.556.075.000 | 1,40 |
| 1.1.3. | Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan | 0,31 | 0,32 | 0,50 | 5.706.050.000 | 0,33 |
| 1.1.4. | Lain-Lain PAD yang sah | 4,83 | 8,99 | 8,57 | 154.817.369.000 | 8,33 |
| 1.2. | Dana Perimbangan | 68,86 | 62,87 | 60,79 | 1.075.832.123.000 | 61,33 |
| 1.2.1. | Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak | 13,19 | 10,87 | 10,49 | 214.366.616.000 | 12,22 |
| 1.2.2. | Dana Alokasi Umum | 51,90 | 49,42 | 45,84 | 784.919.177.000 | 44,75 |
| 1.2.3. | Dana Alokasi Khusus | 3,77 | 2,57 | 4,47 | 76.546.330.000 | 4,36 |
| 1.3. | Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah | 20,68 | 22,59 | 24,92 | 423.139.249.000 | 24,12 |
| 1.3.1 | Hibah | 0,08 | 0,36 | 0,61 | 681.453.000 | 0,04 |
| 1.3.2 | Dana Darurat | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 5,41 | 5,92 | 5,26 | 96.307.857.000 | 5,49 |
| 1.3.4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 10,56 | 10,52 | 15,46 | 264.680.001.000 | 15,09 |

| No. | Uraian | Realisasi 2013 (%) | Realisasi 2014 (%) | Anggaran 2015 (%) | RKPD 2016 | Tahun 2016 (%) |
|-------|---|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 1.3.5 | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | 4,63 | 5,80 | 3,59 | 61.469.938.000 | 3,50 |

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015

Kinerja pengelolaan pendapatan tercermin pada realisasi pendapatan terhadap target pendapatan. Secara umum kinerja pendapatan meningkat, terlihat dari realisasi yang sebelumnya tidak tercapai menjadi tercapai. Bila dilihat rinciannya, terlihat bahwa kinerja retribusi daerah menurun sedangkan pajak daerah mengalami peningkatan. Jadi, pendapatan yang terkait pelayanan publik cenderung sulit realisasinya karena terdapat kebijakan pembebasan biaya retribusi.

Tabel 3.8
Kinerja realisasi Pendapatan Daerah

| No | Uraian | Kinerja *) (%) | | |
|--------|---|----------------|----------|----------|
| | | 2013 (%) | 2014 (%) | 2015 (%) |
| 1 | PENDAPATAN | 2,92 | 1,55 | - |
| 1.1. | Pendapatan Asli Daerah | 4,38 | 13,32 | - |
| 1.1.1. | Pajak Daerah | 15,48 | 4,37 | - |
| 1.1.2. | Retribusi Daerah | (24,36) | (4,57) | - |
| 1.1.3. | Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan | (4,15) | 0,00 | - |
| 1.1.4. | Lain-Lain PAD yang sah | 5,50 | 21,76 | - |
| 1.2. | Dana Perimbangan | 2,53 | (1,42) | - |
| 1.2.1. | Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak | 14,76 | (0,44) | - |
| 1.2.2. | Dana Alokasi Umum | - | - | - |
| 1.2.3. | Dana Alokasi Khusus | - | (25,00) | - |
| 1.3. | Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah | 3,53 | 3,28 | - |
| 1.3.1 | Hibah | (83,62) | (10,44) | - |
| 1.3.2 | Dana Darurat | - | - | - |
| 1.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 26,57 | 20,86 | - |
| 1.3.4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | - | (1,38) | - |
| 1.3.5 | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | (0,74) | (1,94) | - |

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015

Keterangan : *) Angka Sementara

3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Keuangan daerah diupayakan dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Belanja daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Dari besaran dan kebijakan yang bersinambungan dari program-program yang akan dilaksanakan dapat dibaca kemana arah pembangunan di Kabupaten Kudus. Dari perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan otonomi daerah, sistem dan mekanisme APBD menggunakan sistem anggaran kinerja, sehingga membawa implikasi kepada struktur belanja daerah.

Belanja daerah meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan program/kegiatan. Sementara itu belanja langsung merupakan belanja yang dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Penghitungan alokasi belanja langsung untuk pembangunan memperhitungkan kebutuhan pengeluaran yang bersifat wajib dan mengikat, baik pada unsur belanja daerah maupun pengeluaran pembiayaan daerah.

Arah pengelolaan belanja daerah Kabupaten Kudus tahun 2016 sebagai berikut :

a. Belanja tidak langsung

- 1) Kebijakan belanja tidak langsung diprioritaskan belanja yang wajib dikeluarkan antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, serta belanja barang dan jasa administrasi perkantoran. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung bagi SKPD.

- 2) Belanja pegawai diarahkan untuk :
 - a) Gaji dan Tunjangan Pegawai termasuk uang representasi anggota DPRD; gaji pegawai diasumsikan mengalami kenaikan sebesar 8%, akses 2,5% dan pemberian gaji bulan ke-13.
 - b) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD berupa Tunjangan Komunikasi Intensif;
 - c) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
 - d) Tunjangan kinerja PNSD dan Tunjangan Profesi Guru PNSD;
 - e) Belanja Penerimaan Lainnya untuk Bupati/Wakil Bupati berupa Penunjang operasional.
- 3) Belanja hibah digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun 2016 yang diharapkan tetap dari tahun sebelumnya.
- 4) Belanja bantuan sosial dialokasikan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, pada tahun 2016 diproyeksikan tetap dari tahun sebelumnya.
- 5) Belanja Bagi Hasil digunakan untuk pemenuhan kewajiban bagi hasil atas realisasi pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa. Pada tahun 2016 diproyeksikan meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 8,85%.
- 6) Belanja Bantuan Keuangan dialokasikan kepada Pemerintahan Desa baik yang bersifat umum maupun khusus dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan dimana pada tahun 2016 diproyeksikan meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 18,98 %. Sedangkan bantuan kepada Partai Politik diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7) Belanja Tidak Terduga dialokasikan untuk belanja kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

b. Belanja langsung

Belanja langsung diarahkan pada pelaksanaan program dan kegiatan yang mengarah pada pencapaian visi dan misi Kabupaten Kudus dan memberikan manfaat secara luas bagi masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip :

- 1) Efisiensi, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Efektivitas, yang diprioritaskan pada program/kegiatan untuk mendorong program/kegiatan yang mempunyai daya ungkit (*leverage*) atau pengaruh ganda (*multiplier effect*) yang lebih besar misalnya peningkatan infrastruktur, perluasan pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan akses pelayanan kesehatan, peningkatan pelayanan pemerintahan, serta pencapaian visi dan misi Kabupaten Kudus.
- 3) Akuntabilitas, kejelasan tolok ukur dan targetnya, yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kudus.
- 4) Transparansi, dimaksudkan bahwa setiap pengeluaran dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kebijakan belanja diprioritaskan belanja yang wajib dikeluarkan antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja bagi hasil, dan belanja bantuan keuangan kepada desa. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung bagi SKPD. Belanja tidak langsung untuk hibah, bantuan sosial, dan belanja bantuan kepada pemerintah desa serta belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana.

Dalam RPJMD Kabupaten Kudus telah tercantum prediksi belanja dan pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Kudus tahun 2016, namun dengan melihat kondisi perekonomian saat ini maka dilakukan koreksi. Rincian belanja yang mengalami peninjauan, selengkapnya tercantum pada tabel 3.9 di bawah ini.

Tabel 3.9
Perhitungan Kebutuhan Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Kabupaten Kudus

| NO | URAIAN | PROYEKSI RPJMD TAHUN 2016 | PROYEKSI RKPD TAHUN 2016 | SELISIH |
|--------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | | Rp. | Rp. | Rp. |
| A | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 1.093.992.166.000 | 1.087.769.599.000 | (6.222.567.000) |
| 1 | Gaji dan Tunjangan | 744.851.358.000 | 621.860.338.000 | (122.991.020.000) |
| 2 | Belanja Tambahan Penghasilan | 22.817.256.000 | 27.038.643.000 | 4.221.387.000 |
| 3 | Belanja Penerimaan Lainnya, Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH | 4.326.832.000 | 4.002.000.000 | (324.832.000) |
| 4 | Penghasilan Lainnya | 196.228.110.000 | 230.191.691.000 | 33.963.581.000 |
| 5 | Insentif Pemungut Pajak | 4.578.392.000 | 3.505.914.000 | (1.072.478.000) |
| 6 | Insentif Pemungut Retribusi | 2.132.993.000 | 1.230.303.000 | (902.690.000) |
| 7 | Belanja Bunga | 70.802.000 | 3.398.000 | (67.404.000) |
| 8 | Belanja Hibah | 35.527.040.000 | 26.052.945.000 | (9.474.095.000) |
| 9 | Belanja Bansos | 23.474.000.000 | 23.590.757.000 | 116.757.000 |
| 10 | Belanja Bagi Hasil | 7.479.696.000 | 9.467.435.000 | 1.992.739.000 |
| 11 | Belanja Bantuan Kepada Desa | 48.560.687.000 | 136.747.189.000 | 88.186.502.000 |
| 12 | Belanja Bantuan Partai Politik | 945.000.000 | 1.078.986.000 | 133.986.000 |
| 13 | Belanja Tidak Terduga | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | - |
| | | | | |
| B | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 3.375.920.000 | 7.056.579.000 | 3.680.659.000 |
| 1 | Pembentukan Dana Cadangan | - | | - |
| 2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 3.260.920.000 | 7.000.000.000 | 3.739.080.000 |
| 3 | Pembayaran Pokok Utang | 115.000.000 | 56.579.000 | (58.421.000) |
| | | | | |
| Total Pengeluaran Wajib dan Mengikat | | 1.097.368.086.000 | 1.094.826.178.000 | (2.541.908.000) |

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa prediksi belanja tidak langsung dalam RPJMD tahun 2016 sebesar Rp.1.093.992.166.000,- sedangkan proyeksi RKPD sebesar Rp. 1.087.769.599.000,- sehingga terdapat selisih kurang Rp. 6.222.567.000,- atau berkurang sebesar 0,57%. Pengeluaran pembiayaan prediksi dalam RPJMD tahun 2016 sebesar Rp. 3.375.920.000,- sedangkan proyeksi RKPD sebesar Rp.7.056.579.000,- sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp.3.680.659.000,- atau bertambah sebesar 109,03%. Pengeluaran untuk investasi diperuntukan bagi BPR BKK Jati Kab. Kudus sebesar Rp.2.000.000.000,- Bank Pasar sebesar Rp.1.000.000.000,- PDAM sebesar Rp. 2.000.000.000,- Bank Jateng sebesar Rp.2.000.000.000,- dan membayar pokok hutang sebesar Rp.56.579.000,-.

Kebutuhan Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Yang Wajib dan Mengikat pada RKPD tahun 2016 diproyeksikan sebesar Rp.1.094.826.178.000,-. Kebutuhan belanja tidak langsung pada tahun 2016 diproyeksikan

sebesar Rp. 1.087.769.599.000,-. Belanja tidak langsung terutama untuk belanja Pegawai yang mencapai Rp.621.860.338.000,-, penghasilan lainnya sebesar Rp.230.191.691.000,- dan Belanja Bantuan Kepada Desa sebesar Rp.136.747.189.000,-. Kebutuhan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Yang Wajib dan Mengikat pada RKPD tahun 2016 sebesar Rp.7.056.579.000,- yaitu untuk penyertaan modal sebesar Rp.7.000.000.000,- dan pembayaran pokok utang sebesar Rp.56.579.000,-.

Secara rinci Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Yang Wajib dan Mengikat Kabupaten Kudus Tahun 2013 s.d Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10
Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Yang Wajib dan Mengikat Kabupaten Kudus Tahun 2013 s.d Tahun 2016

| No | Uraian | Realisasi Tahun 2013 | Target Tahun 2014 | Proyeksi pada Tahun 2015 | Proyeksi RPJMD Tahun 2016 | Proyeksi RKPD Tahun 2016 | Selisih |
|----|--|----------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|
| | | Rp | Rp | Rp | Rp. | Rp. | Rp. |
| A | Belanja Tidak Langsung | 738.734.501.503 | 947.813.401.000 | 967.975.092.000 | 1.093.992.166.000 | 1.087.769.599.000 | (6.222.567.000) |
| 1 | Gaji dan Tunjangan | 647.389.397.621 | 815.347.426.000 | 852.051.916.000 | 744.851.358.000 | 621.860.338.000 | (122.991.020.000) |
| 2 | Belanja Tambahan Penghasilan | | | | 22.817.256.000 | 27.038.643.000 | 4.221.387.000 |
| 3 | Belanja Penerimaan Lainnya, Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH | | | | 4.326.832.000 | 4.002.000.000 | (324.832.000) |
| 4 | Penghasilan Lainnya | | | | 196.228.110.000 | 230.191.691.000 | 33.963.581.000 |
| 5 | Insentif Pemungut Pajak | | | | 4.578.392.000 | 3.505.914.000 | (1.072.478.000) |
| 6 | Insentif Pemungut Retribusi | | | | 2.132.993.000 | 1.230.303.000 | (902.690.000) |
| 7 | Belanja Bunga | 44.378.263 | 70.802.000 | 70.802.000 | 70.802.000 | 3.398.000 | (67.404.000) |
| 8 | Belanja Hibah | 25.607.571.733 | 46.029.515.000 | 32.813.422.000 | 35.527.040.000 | 26.052.945.000 | (9.474.095.000) |
| 9 | Belanja Bansos | 24.098.658.500 | 32.371.987.000 | 26.187.618.000 | 23.474.000.000 | 23.590.757.000 | 116.757.000 |
| 10 | Belanja Bagi Hasil | 4.319.038.625 | 6.181.567.000 | 6.799.724.000 | 7.479.696.000 | 9.472.435.000 | 1.987.739.000 |
| 11 | Belanja Bantuan Kepada Desa | 37.271.465.261 | 44.812.104.000 | 47.051.610.000 | 48.560.687.000 | 136.747.189.000 | 88.186.502.000 |
| 12 | Belanja Bantuan Partai Politik | | | | 945.000.000 | 1.078.986.000 | 133.986.000 |
| 13 | Belanja Tidak Terduga | 3.991.500 | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | - |
| B | Pengeluaran Pembiayaan | 6.632.657.736 | 51.595.743.736 | 2.915.000.000 | 3.375.920.000 | 7.056.579.000 | 3.680.659.000 |
| 1 | Pembentukan Dana Cadangan | | | | | | - |
| 2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 6.519.500.000 | 51.482.586.000 | 2.800.000.000 | 3.260.920.000 | 7.000.000.000 | 3.739.080.000 |
| 3 | Pembayaran Pokok Utang | 113.157.736 | 113.157.736 | 115.000.000 | 115.000.000 | 56.579.000 | (58.421.000) |
| | Total Pengeluaran Wajib dan Mengikat | | | | 1.097.368.086.000 | 1.094.826.178.000 | (2.541.908.000) |

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015

Pada tahun 2016, dalam dokumen RPJMD belanja langsung diproyeksikan sebesar Rp. 798.427.448.000,-. Berdasarkan hasil forum SKPD, usulan belanja langsung kabupaten mencapai Rp. 748.597.346.000,- dan setelah sinkronisasi melalui musrenbang dan mengakomodir usulan dewan maka total usulan mencapai Rp. 1.516.054.142.000,-. Berdasarkan perhitungan total pendapatan dikurangi dengan total pengeluaran wajib dan mengikat, maka kemampuan belanja langsung pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 659.342.971.000,-. Sedangkan pada RKPD tahun 2016 pagu belanja langsung yang dapat dialokasikan adalah sebesar Rp.979.492.327.000,-. Mengingat keterbatasan dan kemampuan anggaran dibanding usulan, maka masih perlu diadakan penajaman atas kelayakan usulan kegiatan dan rasionalisasi lebih lanjut, yang akan dilaksanakan pada saat menyusun KUA/PPAS tahun 2016.

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan pada penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah, yaitu pada BPR BKK Jati sebesar Rp.2.000.000.000,-, Bank Pasar sebesar Rp.1.000.000.000,-, PDAM sebesar Rp. 2.000.000.000,- Bank Jateng sebesar Rp.2.000.000.000,- dan pembayaran pokok hutang yang jatuh tempo sebesar Rp.56.579.000,-.